

## Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi Komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh)

Jhon Paris Pasaribu <sup>1</sup>, Dian Ekawaty Ismail <sup>2</sup>, Mellisa Towadi <sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo  
96128

[jhonparispasaribu@gmail.com](mailto:jhonparispasaribu@gmail.com), [dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id), [mellisatowadi@ung.ac.id](mailto:mellisatowadi@ung.ac.id)

**Abstract :** *The conflict between the Indonesian government and the KKB separatist group in Papua is a conflict that has existed for a long time and until now there has been no meeting point. The Indonesian government has taken various ways to resolve the conflict. Previously, Indonesia had also been faced with the same problem. Namely the Free Aceh Movement (GAM) group which demanded that Aceh be independent and stand alone as a legitimate state. In both conflicts, it has caused unconductiveness in society, both in terms of economy, politics, and so on. As a result of both conflicts, both with KKB and GAM have claimed many lives and have even targeted civilians. Then in an effort to resolve the government has a different way. In this study, the author will describe how the government's efforts to resolve conflicts with the Armed Criminal Group (KKB) in Papua and also with the Free Aceh Movement (GAM) group in Aceh differ.*

**Kata Kunci :** *Conflict resolution efforts, KKB, GAM*

**Abstrak:** Konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis KKB di Papua merupakan konflik yang telah ada sejak lama dan sampai saat ini belum ada titik temu. Berbagai cara pemerintah Indonesia telah lakukan dalam penyelesaian konflik tersebut. Sebelumnya, Indonesia juga telah pernah diperhadapkan dengan masalah yang sama. Yaitu kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut agar Aceh merdeka dan berdiri sendiri sebagai satu negara yang sah. Dalam kedua konflik tersebut telah menimbulkan ketidak kondusifan dalam masyarakat, baik dalam segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Akibat dari kedua konflik, baik dengan KKB dan juga GAM tersebut telah banyak merenggut korban jiwa bahkan juga telah menyasar masyarakat sipil. Kemudian dalam upaya penyelesaiannya pemerintah memiliki cara yang berbeda. Dalam kajian ini penulis akan menguraikan bagaimana perbedaan cara pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan juga dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

**Kata Kunci:** Upaya penyelesaian konflik, KKB, GAM

### PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) melakukan penyerangan terhadap aparat TNI dan POLRI, warga sipil Papua serta warga sipil pendatang. Aksi yang dilakukan oleh KKB Papua ini telah meresahkan masyarakat Papua yang tinggal maupun bekerja di sana. Aksi mereka juga telah menelan banyak korban, mulai dari aparat militer, tenaga medis, tenaga pengajar hingga siswa yang belajar di Papua.

Akar masalah yang menyebabkan konflik di Papua, bukan berasal dari akar masalah yang sederhana tetapi berakar dari persoalan yang cukup kompleks. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan penelitian yang tertuang dalam buku berjudul

*Papua Roadmap* dan merumuskan empat permasalahan mendasar antara lain penduduk asli Papua merasakan perbedaan dan menarik diri, kegagalan pembangunan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan militer, hingga permasalahan proses integrasi Papua ke Indonesia. Selanjutnya Richard Chauvel yang merupakan seorang ahli sejarah politik Papua merumuskan beberapa akar permasalahan antara lain Pertama, kekecewaan yang dirasakan karena Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kedua, para kalangan atas tanah Papua merasakan adanya rivalitas dengan pejabat yang berasal dari luar tanah Papua. Ketiga, perkembangan pemerintahan dan ekonomi di tanah Papua yang berbeda. Keempat, masyarakat asli Papua yang merasa dirugikan oleh para pendatang baru. Pandangan-pandangan ini lah yang menjadi legitimasi bagi para kelompok yang merasa tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan atas tanah Papua (Anugerah, 2019).

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) yang telah melakukan aksi teror hingga menyebabkan perasaan tidak nyaman dan aman antara lain; Pertama, pemekaran wilayah negara di Papua. Menurut Joko Widodo selaku Presiden NKRI menegaskan bahwa pemekaran wilayah negara di Papua merupakan suatu upaya menuju pembangunan yang berkeadilan. Kedua, pembangunan infrastruktur perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi komunal yang mendorong kohesi ekonomi di wilayah perbatasan dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan di Papua Barat tanpa mengorbankan keamanan manusia. Ketiga, Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP ini bertujuan untuk melaksanakan tugas non tempur seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.

Upaya selanjutnya, Operasi Militer untuk Perang (OMP). OMP ini merupakan operasi militer untuk perang yaitu segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia. Operasi militer yang telah dilakukan TNI terhadap KKB Papua antara lain Operasi Wisnumurti, Operasi Gagak, Operasi Pamungkas dan sebagainya. Kelima, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR yang dapat dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dengan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang sedang bersengketa antara lain negosiasi, mediasi internasional, arbitrase internasional dan konsiliasi.

Selain Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia lainnya yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Akar permasalahan munculnya GAM ini yaitu bermula ketika pemerintah Indonesia melanggar janji kepada Aceh

untuk memberikan kekuasaan otonomi dengan diterapkannya syariat-syariat islam di wilayah Aceh. Selain itu, Aceh dimasukkan ke wilayah keresidenan Sumatera Utara bersama dengan Medan sehingga memperburuk dan menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Pada tahun 1953, Teungku Muhammad Daud Beureueh (salah satu ulama Aceh) memimpin pemberontakan dengan tujuan untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII). Namun, pada akhirnya pemberontakan ini pun berakhir damai sebab pemerintah Indonesia memperbolehkan Aceh menjadi daerah istimewa dengan menerapkan syariat-syariat islam pada tiga aspek, yakni agama, adat istiadat dan pendidikan.

Pemberontakan di Aceh tidak berhenti disitu, pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro mengumumkan sebuah gerakan pemberontakan rakyat Aceh yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM bertujuan untuk mengajukan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh dari pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto yang dirasa condong sentralistik dan otoriter. Rakyat Aceh merasakan pembangunan di Aceh tidak dibangun dengan baik dan jauh dari kesejahteraan seperti pembangunan di pusat.

Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka yaitu dengan melakukan perundingan. Pada tanggal 27 Februari 2005, GAM dan Pemerintah RI mulai berunding di Vantaa, Finlandia. Setelah berunding selama 25 hari lamanya, perundingan dinyatakan berhasil pada 17 Juli 2005. Tanda tangan damai pun dilaksanakan pada 15 Agustus 2005. Setelah proses yang Panjang, pada 27 Desember, juru bicara militer GAM, Sofyan Dawood, bahwa semuanya telah bubar secara formal.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu dalam hal ini peneliti akan membandingkan bagaimana cara pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan juga bagaimana cara pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua**

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) yang telah melakukan aksi teror hingga menyebabkan perasaan tidak nyaman dan aman antara lain:

#### **a. Pemekaran Wilayah**

Menurut Joko Widodo, pemekaran wilayah negara di Papua bertujuan untuk pembangunan yang berkeadilan. Dengan adanya tiga daerah otonom baru yaitu Provinsi Papua bagian selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Dataran Tinggi, maka akan mempermudah penyebaran pelayanan ke seluruh wilayah Papua yang sangat luas. Dilakukannya pemekaran wilayah ini berasal dari cita-cita masyarakat Papua dan berasal dari beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah (BPMI Setpres, 2023).

Berdasarkan hasil revisi UU Otsus, tujuan pemekaran di Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik dan mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, adanya pemekaran Daerah Otonom Baru bertujuan untuk memberikan ruang bagi OAP dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya (Djeen, 2022).

#### **b. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk membangun kawasan-kawasan yang memiliki potensi strategis dalam suatu wilayah. Kawasan-kawasan potensial ini yaitu kawasan perkotaan meliputi pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pedesaan dan kawasan pariwisata. Peran penting dibangunnya kawasan potensial yaitu meningkatkan perekonomian wilayah.

Pembangunan infrastruktur yang sesuai dan memadai dapat meningkatkan produktivitas kawasan tersebut (Amanda & Pramono, 2023).

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membangun Papua yang lebih maju dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur selama masa jabatan Presiden Joko Widodo antara lain pembangunan jalan trans Papua, Akses PON Ke-XX, serat optik Palapa Ring Timur, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke dan sebagainya (BeritaSatu.com, 2021).

c. Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

OMSP ini bertujuan untuk mencegah peperangan, menyelesaikan berbagai pertikaian di dalam negeri maupun luar negeri dengan upaya perdamaian Internasional serta memberikan dukungan terhadap pemerintah atau aparat sipil lainnya dalam mengatasi keamanan negara dan sebagai alat pendukung atau pembantu kegiatan otoritas sipil secara umum dengan tujuan untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil (Amanda *et al.*, 2023).

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menetapkan status operasi siaga tempur untuk daerah rawan di Papua. Penetapan status ini ditetapkan karena banyaknya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 321/Galuh Taruna Kostrad. Empat prajurit gugur akibat serangan ini. Gugurnya para prajurit karena menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB.

Operasi siaga tempur ini memiliki status siaga antara lain Pertama, status siaga tiga yaitu pada status ini setiap personel tidak boleh keluar kota dari tempat mereka bertugas. Kedua, status siaga dua yaitu para prajurit wajib untuk siap siaga di markas. Ketiga, status siaga satu yaitu para personel TNI ditempatkan oleh pusat komando di pos-pos yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hadirnya TNI di Papua dengan tujuan membantu tugas Polri dalam koridor OMSP. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Operasi di Papua pada saat ini masih merupakan operasi penegakkan hukum yang dikendalikan oleh Polri (Kompas.com, 2023).

d. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

ADR merupakan proses penyelesaian suatu konflik yang terjadi di luar lembaga pemerintah mana pun. Adapun metode-metode ADR antara lain mediasi, konsiliasi, arbitrase dan negosiasi. ADR ini merupakan metode yang bisa dikatakan

“halus” tanpa adanya kekerasan dan meminimalisir korban berjatuhan (Amanda *et al.*, 2023).

Pendekatan ADR ini dinilai pendekatan yang sudah seharusnya digunakan karena pemerintah Indonesia ingin merangkul para KKB untuk bersama membangun daerah. Hal ini diharapkan Papua akan terus menjadi daerah yang maju setingkat dengan daerah-daerah lainnya.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh**

Pada awalnya, upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan GAM menggunakan operasi bersenjata. Upaya ini berhasil menekan gerakan yang ada di sana, tetapi dari operasi inilah kemudian memunculkan pelanggaran HAM berat. Pemberantasan GAM dengan menggunakan pendekatan militer cukup memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Aceh. Maka dari itu, pendekatan militer dirasa tidak efektif dan pemerintah Indonesia kembali melakukan upaya lain yaitu melalui cara berdialog dengan kelompok GAM. Pada awalnya sejumlah negosiasi yang diberikan mengalami kegagalan dan tidak adanya jalan keluar antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Adanya intervensi dari pihak internasional dengan didukung keinginan antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Negosiasi ini dilakukan secara eksternal dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Sehingga pemerintah Indonesia menyimpulkan bahwa pendekatan berdialog ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan militer (Sandiah *et al.*, 2023).

## **SIMPULAN**

Konflik antara pemerintah Indonesia dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan konflik vertikal terlama yang pernah terjadi di Indonesia dan bahkan hingga saat ini masih terus berlangsung. Pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan dialog (pendekatan *soft power*). Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka, pemerintah lebih cenderung menggunakan pendekatan militer seperti pemberlakuan darurat militer pada tahun 2003. Pendekatan ini cukup berdampak dalam memukul mundur para aktivis GAM namun pada saat itu juga lah muncul isu-isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik dengan GAM. Hingga pada akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan disepakatinya beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan aktivis GAM pada tahun 2005.

## REFERENSI

- Amanda Muhammad Rasyiid & Budi Pramono, Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, Vol. 5. No. 2, 2023, DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2855
- BeritaSatu.com, Ini Pembangunan Infrastruktur Papua di Era Jokowi dalam lama <https://www.beritasatu.com/ekonomi/836065/ini-pembangunan-infrastruktur-papua-di-era-jokowi>, diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 21.34
- Boy Anugerah, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, 2019
- BPMI Setpres, Presiden Jokowi: Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan dalam laman <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan>, diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 20.11
- Djeen Aurelia Angelina, Upaya-Upaya Indonesia dalam Resolusi Konflik Papua, Jurnal Sosio-Komunika, Vol. 1, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.27>
- Kompas.com, TNI Siaga Tempur di Papua, Apa Maksudnya? Begini Penjelasannya, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/21/05300021/tni-siaga-tempur-di-papua-apa-maksudnya-begini-penjelasannya>, diakses pada 31 Agustus 2023 Pukul 11.03
- Sandiah et al. (2023). Manajemen Konflik Pemerintah Indonesia Terhadap Gerakan Aceh Merdeka.